

Sumber: Lovell, 1970 hal 99.

Berdasarkan pola pemikiran strategi diatas, Indonesia menggunakan strategi akomodasi karena menurut analisa penulis Indonesia dikategorikan sebagai *inferior states*. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, serta adanya beberapa klaim wilayah dan budaya yang dilakukan oleh Malaysia, namun Indonesia masih tetap tidak mengambil sikap yang tegas. Indonesia hanya mencoba menyelesaikan konflik tersebut melalui cara diplomasi dan perundingan damai.

Keefektifan strategi suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatannya nasionalnya sendiri. Dalam menerapkan strateginya, suatu negara harus mempertimbangkan kekuatan dan sumber dayanya yang ada. Kekuatan (*power*) dan sumber daya tetap merupakan sumber penting dalam menentukan keberhasilan diplomasi, karena faktor ini terakumulasi dalam kapabilitas suatu negara terhadap negara lain dalam diplomasi.¹⁷ Sehingga suatu negara dikatakan berhasil melakukan proses diplomasi jika negara tersebut mampu menggunakan kekuatan *powernya* dengan baik.

Hubungan Negara-negara dalam sistem internasional adalah untuk menambah *power*. Jadi, tujuan sebuah Negara mengadakan diplomasi adalah untuk meningkatkan *power*, sehingga mencapai kepentingan nasionalnya. *Power* terbagi dua, yaitu: Nasional *power* dan Internasional *power*. Nasional *power* merupakan penunjang dari internasional *power*, jika nasional *power* yang dimiliki suatu Negara kuat maka internasional *power* akan lebih maksimal terhadap Negara lain. Oleh karena itu Indonesia melihat bahwa secara *power* Indonesia lemah, sehingga Indonesia cenderung menggunakan jalan damai terhadap Malaysia, tanpa menggunakan ancaman kekerasan terhadap Malaysia.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

¹⁷ Drs. M, Saeri M.Hum, *Diplomasi dalam Perspektif Politik*, hlm 137-138. Dalam jurnal antar bangsa, Vol 1 No 2, Juli 2003. Universitas Riau. Pekanbaru

Salah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Termasuk Indonesia yang mempunyai persoalan dengan perbatasan, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga. Batas (negara) tidak saja berperan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara. Bahkan, batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara.¹⁸ Ini sebagai upaya membentuk tata interaksi antarnegara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis.

Strategi-strategi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia di bidang perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan Provinsi kepulauan Riau, Kalimantan dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya yang dapat menimbulkan konflik diantara Indonesia dan Malaysia.

2.1 Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan

Secara umum dalam pembangunan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (*holistic*), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi tersebut. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional.

Pembangunan di kawasan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau secara spesifik dapat menggunakan berbagai macam skenario guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Namun pada dasarnya bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus mampu menuntaskan 3 (tiga) permasalahan besar yang ada di wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan
2. Deliniasi batas yang tidak jelas, serta
3. Masalah stabilitas keamanan wilayah.

Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 Bagian IV Bab 26, telah disebutkan bahwa “Program Pengembangan

¹⁸ Diakses dari. <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/internasional/6777-isu-perbatasan-dan-keamanan-nasional.pdf>. Pada tanggal 20 januari 2010

Wilayah Perbatasan bertujuan untuk beberapa kepentingan nasional Indonesia, yaitu:¹⁹

1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga”.

Beberapa langkah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan menghindari adanya konflik perbatasan dengan negara lain, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:²⁰ Peningkatan pos keamanan darat, dan pengembangan sarana prasarana pertahanan dan keamanan di sekitar laut (pantai). Selain itu juga Indonesia menggunakan pendekatan dengan cara mengembangkan pos keamanan minimal dalam satu kecamatan perbatasan terdapat satu pos keamanan sehingga *coverage* area pengawasan keamanan semakin rapat untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dari negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste.

Selain itu untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau juga menggunakan pendekatan kawasan laut yang dilakukan dengan mengembangkan sistem keamanan yang berbasis ke laut. Pendekatan ini diterjemahkan dengan mengembangkan sarana prasarana pertahanan dan keamanan di sekitar pantai yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Disamping itu juga memberdayakan nelayan laut yang berada di wilayah Batam, Natuna, Karimun dan Lingga untuk turut serta dalam proses menjaga keamanan di laut.

Peningkatan fasilitas keimigrasian untuk pengendalian sekaligus mendukung kelancaran arus masuk barang dan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan keamanan di wilayah perbatasan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah penerapan sanksi yang tegas terhadap bentuk pelanggaran, sebagai wujud pengendalian pemanfaatan ruang, baik praktek *illegal logging* maupun *illegal fishing*.

Selain dari pendekatan keamanan untuk meningkatkan kekuatan dan menghindari terjadinya perebutan wilayah oleh Malaysia, Indonesia juga bisa menggunakan konsep pengembangan wilayah perbatasan melalui peningkatan kesejahteraan.²¹ Pengembangan kawasan perbatasan perlu pula menekankan kepada aspek-aspek lain diluar aspek keamanan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan sumber

¹⁹ Disampaikan pada acara *Roundtable Discussion* “Meningkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”, LEMHANNAS RI, Jakarta, 11 Nopember 2008

²⁰ Tim LESPERSSI. 2007. *Borders and Security Governance: Managing Borders in Globalised World*. Jakarta: LESPERSSI.

²¹ Anggoro, Kusnanto. 2006. “Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan dan Keamanan Negara” dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: ProPatria Institute.

pendapatan negara, dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah negara tetangga, dan sekaligus menangkap peluang ekonomi dari negara tetangga. Strategi yang dapat dilaksanakan Indonesia untuk mengimplementasikan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau adalah melalui, beberapa hal yaitu: Mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada, dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial cepat tumbuh, berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar lokal, regional dan global,²² serta mendorong perkembangan fungsinya sebagai andalan pembangunan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan sekitarnya.

Indonesia juga bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing kegiatan usaha, serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh di berbagai daerah. Selain itu meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan, peningkatan sarana dan prasarana sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah perbatasan dan ke daerah-daerah pedesaan baik darat, laut dan udara.

Peningkatan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang kondusif yang memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke daerah perbatasan. Dari keseluruhan paparan di atas, maka dapat dimaknakan bahwa dengan memperhatikan potensi dan kendala wilayah, serta situasi pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan darat, maka skenario pendekatan pengembangan kawasan perbatasan darat diarahkan dengan mengembangkan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan memperhatikan sistem pertahanan dan keamanan di sekitar kawasan perbatasan untuk meminimalisir ancaman dari negara tetangga serta potensi gangguan keamanan.

2.2 Peningkatkan Sistem ALUTSISTA TNI

Perubahan politik dunia internasional yang terjadi pada zaman era globalisasi ini, telah mengakibatkan terjadinya suatu kompetisi antar bangsa-bangsa didunia internasional. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh dan kekuasaan yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain meyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru.

Pada masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menjadi tolak ukur bagi negara-negara dunia internasional, yakni yang berhubungan dengan bidang geopolitik dan geostrategi, khususnya perebutan pengaruh dan kekuasaan antara kekuatan blok barat dan blok timur.²³ Pada masa itu, kekhawatiran dunia internasional lebih mengarah pada masalah-masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni internasional diantara kedua kekuatan tersebut baik blok barat maupun blok timur.

²² *Ibid.* Hlm 9

²³ Kata pengantar Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam penerbitan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 (diakses 29 Agustus 2009).

Pada saat ini, isu keamanan menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan, pembajakan, penyeludupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut semakin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dan pelaku-pelaku yang berasal dari jaringan lintas negara yang sangat pandai dan memiliki kemampuan teknologi serta dukungan finansial yang besar.

Di bidang pertahanan dan keamanan negara, perubahan mendasar yang terjadi telah mencakup aspek-aspek yang struktural, kultur dan hukum. Perubahan tersebut kemudian tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.²⁴ Undang-undang Pertahanan tersebut telah mengamankan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam sebuah buku putih pertahanan dan keamanan negara.

Sejalan dengan komitmen reformasi nasional, reformasi di bidang pertahanan dan keamanan negara juga dilaksanakan secara konsepsional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Reformasi pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu perwujudan dari komitmen reformasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut yang mencakup penataan struktural, kultural dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang bersifat utuh dan menyeluruh.

Penataan struktur mencakup penataan organisasi pertahanan negara yang menyentuh segi-segi substansial. Perubahan ini meliputi perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan, fungsi dan tugas Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penataan organisasi ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seluruh unsur-unsur negara tersebut akan bertindak lebih efektif, sesuai dengan perkembangan konteks strategis pertahanan dan keamanan negara. Perubahan pada aspek kultur dan tata nilai ini akan diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggaraan pertahanan negara dalam memposisikan diri sesuai peran dan tugasnya sebagai insan pertahanan negara yang profesional.

Pada lingkup domestik, Indonesia sebagai negara yang berada di tengah-tengah perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan juga, ikut mempengaruhi perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di lingkungan domestik Indonesia. Isu keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Potensi dukungan terhadap pertahanan dan keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan dan keamanan negara yang belum digunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan keamanan yang relatif bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih

²⁴ *Ibid.*,

efektif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa dokumen *Strategic Defense Review* (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara.²⁵

Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pertahanan, kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu TNI dan kemampuan komponen cadangan pertahanan. Dalam era konsolidasi perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, penyusunan perencanaan kebijakan dan strategi pertahanan dalam kerangka peningkatan kemampuan pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan membutuhkan seluruh peranan masyarakat yang kuat dalam sarana mewujudkannya.²⁶

Selain itu, di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan kehidupan demokrasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat menjalankan peran aktif sebagai bagian komponen bangsa yang turut memikul tanggung jawab peningkatan kemampuan pertahanan secara keseluruhan.

Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI di masa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Selain itu, masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 tahun mendatang.

Selama ini upaya memodernisasi peralatan pertahanan secara bertahap selalu terhambat oleh adanya embargo yang dilakukan oleh beberapa negara kepada Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan. Ketidaksiharian antara kebutuhan peralatan pertahanan negara serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab terjadinya ketertinggalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap negara lain.

Dengan adanya peningkatan ALUTSISTA ini di Provinsi Kepulauan Riau telah ditempatkan markas personel Angkatan Laut dan Darat di Pulau Batam yang tugas personel tersebut adalah menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Selain itu juga peningkatan kapabilitas militer ini diharapkan mampu untuk mengurangi adanya perebutan kembali wilayah kepemilikan Indonesia terhadap Malaysia.

²⁵ Buku Pertahanan Presiden Republik Indonesia. Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Tahun 2009. Bagian 2. Hlm 1

²⁶ *Ibid.* Hlm 2

2.3 Kerjasama Pertahanan dengan Cina tahun 2007

Pasca pemerintahan presiden Soeharto tahun 1998 sampai saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia dalam satu dekade terakhir ini tidak memiliki wibawa dan pengaruh besar dalam kawasan regional dan dunia internasional, seperti yang terjadi dalam kepemimpinan Soeharto.²⁷ Banyak orang memandang bahwa pada zaman pemerintahan Soeharto Indonesia menjadi negara yang terpendang di dunia internasional, khususnya di forum regional ASEAN.

Dengan jatuhnya rezim politik orde baru di Indonesia pada tahun 1998, maka hal ini memberikan ruang bagi etnis Cina untuk memperoleh dan melaksanakan hak-hak sosial, politik dan budaya yang lebih luas. Perubahan ditingkat domestik yang ditandai dengan iklim sosial dan politik yang lebih positif bagi etnis Cina di Indonesia itu berkombinasi dengan perubahan regional setelah krisis Asia. Hal ini ditambah lagi dengan munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi baru didunia internasional dan dikawasan Asia.

Peningkatan hubungan diplomatik Indonesia dan Cina secara legitimasinya terealisasi dengan ditandatanganinya *Strategic Partnership Agreement* atau yang dikenal dengan Nota Kesepahaman Strategis antara Indonesia dan Cina pada tanggal 25 April 2005. Nota kesepahaman strategis ini ditandatangani seiring dengan adanya kunjungan Presiden Cina Hu Jin Tao ke Indonesia.

Dalam deklarasi diantara kedua kepala negara ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jin Tao menyatakan sepakat bahwa kemitraan strategis ini akan berupa hubungan yang tidak memihak dan tidak tertutup yang ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kedua negara beserta rakyatnya.²⁸ Dalam Nota Kesepahaman ini juga terdapat tiga bahasan atau bidang kehidupan yaitu terdiri atas kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan pembangunan serta kerjasama di bidang sosial dan budaya.

Ketika terjadi embargo militer oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia khususnya dalam persediaan persenjataan bagi perlengkapan militer Indonesia. Maka Indonesia lebih memilih Cina sebagai rekan partner kerjasama untuk melengkapi peralatan militer Indonesia. Kemajuan-kemajuan yang diraih oleh proses modernisasi militer dan pembangunan industri nasional Cina menjadi salah satu ketertarikan bagi pemerintah Indonesia untuk menjalin hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan pemerintah Cina.

Selain adanya alasan tersebut, peralatan persenjataan yang berasal dari Cina juga memiliki tingkatan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga peralatan persenjataan yang berasal dari negara-negara Barat. Hal ini ditambah lagi dengan minimnya anggaran pertahanan dan keamanan yang dimiliki oleh Indonesia. Hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan yang dijalin oleh Indonesia dan Cina telah memberikan alternatif baru bagi TNI untuk keluar dari ketergantungannya pada peralatan persenjataan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, kerjasama kedua negara kedepannya, diharapkan mampu

²⁷ Zainudin Fajar. *Hubungan Indonesia-malaysia, Memerlukan Perspektif dan kebijakan baru*. Jurnal Hukum Internasional. Vol 3, Nomor 3, Tahun 2006

²⁸ *Ibid.* Hlm 58

mengurangi dominasi pengaruh Amerika Serikat dalam menyediakan persenjataan militer Indonesia.

Perkembangan militer Cina dewasa ini juga sangat mengkhawatirkan negar-negara lain, khususnya negara-negara Barat. Pada tahun 2008, anggaran militer Cina berkisar antara A\$ 58 miliar atau setara dengan Rp. 520 triliun dan menjadikan Cina sebagai negara dengan pengeluaran biaya militer ke empat terbesar di dunia dan angka ini menunjukkan peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan yang pesat sebesar 11,8 %.²⁹ Sehingga peningkatan anggaran pertahanan militer Cina ini membuat Cina semakin maju dalam, bidang keamanan negara.

Perkembangan ekonomi Cina yang semakin maju dewasa ini, mendukung hubungan Cina dengan negara-negara dikawasan Asia Tenggara yang mulai difokuskan pada hal yang dapat mendukung keuntungan ekonomi bersama.³⁰ Pemikiran untuk mendukung keuntungan bersama ini juga dilakukan oleh Cina di bidang kerjasama pertahanan dan keamanan. Penjualan senjata dan peralatan militer lainnya kepada negara-negara asing tidak hanya didominasi oleh kepentingan ideologi, melainkan kepentingan untuk memperkuat jaringan kemitraan yang tidak membedakan latar belakang ideologi dan keuntungan finansial yang dapat diraih dari kerjasama tersebut.

Perjanjian pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Cina bukan merupakan pakta pertahanan dan tidak memuat detail mengenai pelaksanaan hubungan kerjasama.³¹ Isi perjanjian pertahanan dan keamanan bersama ini terdiri dari berbagai kegiatan yang selama ini sudah berlangsung diantara militer kedua negara. Selain itu, perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Cina ini secara langsung secara simbolis menghapus antagonisme yang selama ini terjadi di tubuh TNI terhadap militer Cina.

Perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Cina memang diakui oleh Indonesia memiliki pengeluaran sisi keuangan yang lebih rendah dan minim.³² Hal ini tentu saja sangat membantu Indonesia dari segi anggaran belanja pertahanan, karena anggaran belanja pertahanan dan keamanan Indonesia tidak sebanding dengan negara-negara lain.

Perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia dan Cina juga difokuskan pada pembuatan roket dan peluru kendali yang kedepannya diharapkan juga mampu digunakan dalam memproduksi bagian-bagian tertentu seperti *launcher* dan amunisi.³³ Kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Cina juga dimulai dengan pembelian peralatan militer lainnya

²⁹ Department of Defens, United States of America. *Annual Report to the Congress: Military power of the People's Republic of China*. 2007. Hlm 25

³⁰ Richard Baum. *Burying Mao. Chines Politics in The Age of Dieng Xiao Ping*. Princeton: University Press. 1994. Hlm 4-5

³¹ I. Wibowo. 2004. *Belajar dari Cina*. Jakarta. Penerbit buku Kompas, Hlm 40

³² *Ibid*. Hlm 159

³³ Diakses dari. <http://www.Jakartapos.com> *China, Indonesia start joint military production*. Edisi tanggal 12 Februari 2008.

seperti pembelian kendaraan berlapis baja dan kapal patroli. Dengan ini diharapkan ketergantungan Indonesia terhadap pasokan persenjataan dari negara-negara barat dapat dikurangi dan industri militer nasional dapat mulai dikembangkan secara berkelanjutan.

Perjanjian pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Cina ini dilihat sebagai kemungkinan adanya pergantian haluan dalam strategi geopolitik Indonesia.³⁴ Percaturan politik internasional dewasa ini tidak hanya didominasi oleh persetujuan antara blok Barat dan Timur atau antara negara-negara kapitalis dan komunis. Sementara itu, Indonesia selama ini selalu menunjukkan kebijakan yang anti terhadap komunis, namun setelah beberapa tahun ini Indonesia sepertinya memperhatikan hubungan diplomatiknya dengan Cina yang dikenal sebagai negara komunis tertua di dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan - penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa strategi Indonesia terhadap Malaysia dalam mengatasi konflik perbatasan perairan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 adalah sebagai berikut: Indonesia melakukan peningkatan terhadap kapabilitas kekuatan ALUTSISTA TNI guna menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia, Indonesia mengadakan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Cina pada tahun 2007 untuk meningkatkan kekuatan militer dan mengurangi ancaman terhadap wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu juga, untuk menghadapi tekanan Malaysia Indonesia mengadakan perundingan bilateral terhadap Malaysia tahun 2010 untuk menghindari terjadinya konfrontasi diantara kedua negara dalam konflik perbatasan perairan dan Indonesia menempuh jalur diplomasi damai melalui proses negosiasi terhadap Malaysia.

Konflik antara Indonesia dan Malaysia telah terjadi sejak awal negara ini berdiri. Serumpun yang selama ini diangkat tidak menjadi jaminan bagi kedua negara untuk tetap hidup rukun dan damai. Konflik antara Indonesia dan Malaysia kembali terjadi pada tahun 2001 dalam permasalahan konflik kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dan untuk menyelesaikan permasalahan ini kedua negara sepakat untuk menyerahkan kedaulatan dan permasalahan ini kepada Mahkamah Internasional dan hasilnya Malaysia memenangkan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Sehingga dengan hal ini semakin menjadikan Malaysia sebagai ancaman kedaulatan bagi Indonesia. Selain itu permasalahan pengklaiman budaya seperti tari pendet, reog Ponorogo dan beberapa budaya lainnya juga semakin memicu panasnya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga konflik terbaru tahun 2010 di perbatasan Kepulauan Riau menjadi titik fokus

³⁴ Patrick Nathan. *Indonesia's Relations With China: Analyzing Strategic Reorientation, Jakarta's Motivation and Beijing's Strategic value*. Pointer. Vol 2, No.2

pembicaraan penulis, dimana dengan kaburnya wilayah perbatasan mengakibatkan sering terjadinya salah paham diantara petugas masing-masing negara.

Pada saat ini, isu keamanan menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya aktivitas *terorisme*, perampokan, pembajakan, penyeludupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut semakin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dan pelaku-pelaku yang berasal dari jaringan lintas negara yang sangat pandai dan memiliki kemampuan teknologi serta dukungan finansial yang besar.

Di bidang pertahanan dan keamanan negara, perubahan mendasar yang terjadi telah mencakup aspek-aspek yang struktural, kultur dan hukum. Perubahan tersebut kemudian tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.³⁵ Undang-undang Pertahanan tersebut telah mengamanatkan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam sebuah buku putih pertahanan dan keamanan negara.

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa dokumen *Strategic Defense Review* (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Alat utama sistem senjata TNI Angkatan Darat masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60% dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50%. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan.

Sehingga dengan pertahanan dan keamanan negara yang cukup kuat baik dari segi strategi dan kekuatan persenjataan dapat mendukung terciptanya stabilitas dan profesionalitas TNI yang memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia dari ancaman domestik dan dalam negeri. Begitu juga dengan dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang sampai saat ini untuk menangani wilayah perbatasan saja belum tuntas dibicarakan oleh kedua negara. Sampai saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia masih sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan kedua negara secara perundingan dan negosiasi.

³⁵ *Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnanto Anggoro, 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan dan Keamanan Negara; dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: Pro Patria Institute.
- Bandoro Bantarto,. 1992. *Masalah keamanan internasional, Model center periphery*. CSIS
- Baylis, John and teven Smith, *The Globalization of World Politics*, the 3th edition: an introduction to international Relations. New York: Oxford University Press, 2001
- Baum,Richard, *Burying Mao Chines Politics in The Age of Dieng Xiao Ping*. Princeton: University Press. 1994.
- Buku Pertahanan Presiden Republik Indonesia. 2009. Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara.
- Department of Defens, United States of America. 2007. *Annual Report to the Congress: Military power of the People's Republic of China*.
- Lovel, John P, *Foreign Policy in Perspective; Strategy, Adaptation, Decision Making*, Bloomington Indiana, Indiana Univ. Press, 1970
- Nathan, Patrick, *Indonesia's Relations With China: Analyzing Strategic Reorientation, Jakarta's Motivation and Beijing's Strategic value*. Pointer. Vol 2, No.2
- Nuchterlain, Donald E.. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).
- Makalah disampaikan pada acara *Roundtable Discussion* "Meningkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI", LEMHANNAS RI, Jakarta, 11 Nopember 2008
- M, Saeri, *Diplomasi dalam Perspektif Politik*, . Dalam jurnal antar bangsa, Vol 1 No 2, Juli 2003. Universitas Riau. Pekanbaru
- Sufri Yusuf, 1989. *Hubungan Internasional dan Poltik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.



- T. May. Rudi. 2002. *Studi Strategi dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung. Refika Aditama
- Zainudin Fajar. *Hubungan Indonesia-malaysia, Memerlukan Perspektif dan kebijakan baru*.
Jurnal Hukum Internasional. Vol 3, Nomor 3, Tahun 2006
- Tim LESPERSI. 2007. *Borders and Security Governance: Managing Borders in Globalised World*. Jakarta: LESPERSI.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008; Kata pengantar Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam penerbitan; diakses 29 Agustus 2009
- Buku Putih Pertahanan Presiden Republik Indonesia. Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Tahun 2009. Bagian 2
- I. Wibowo. 2004. *Belajar dari Cina*. Jakarta. Penerbit buku Kompas
- <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/internasional/6777-isu-perbatasan-dan-keamanan-nasional>, pada tanggal 20 januari 2010
- <http://www.IndonesianRadio.index.php.htm>. *Dinamika Asia Tenggara*. Pada tanggal 4 September 2010.
- <http://www.interstate.relation.cooperation.concordanceandcompetition.html>. Pada tanggal 25 februari 2009 pukul 19.50 wib
- <http://www.Jakartapos.com> *China, Indonesia start joint military production*. Edisi tanggal 12 Februari 2008.
- <http://www.kompas.com./Opini/KegagalanDiplomatik,IndonesiaVersusMalaysia/OlehM.Ashadi>. Pada tanggal 30 Januari 2010
- <http://www.kompas.com>. *Potensi Konflik karena Masalah Perbatasan*. Pada tanggal 18 Februari 2010.
- <http://www.kompas.com>. *Serumpun tak Bersatu*. Pada tanggal 10 Januari 2009, pukul 14.25
- <http://www.sumbar.prov.go.id>. *persepsi diplomasi*. Pada tanggal 10 Mei 2010. Pukul 10.00
- <http://www.tempointeraktif.com>/diakses pada bulan Juli 2006. *Indonesia-Malaysia; amankan perbatasan*". Pada Tanggal 18 Juli 2010.
- <http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/66/Default.aspx>, diakses tanggal 19 Juli 2007.

